

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem perekonomian tidak akan terlepas dari sebuah Negara, semua Negara mempunyai sistem perekonomian yang dijalankan. Sebuah Negara apabila semakin maju dan berkembang tidak akan terlepas dari perekonomian yang mendukungnya yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai sektor. Salah satu syarat penting menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat yaitu dengan adanya pembangunan ekonomi. Sebuah pembangunan yang ingin diperoleh dengan maksimal harus melibatkan banyak pihak yang terlibat dan saling berpengaruh positif satu sama lain, sehingga dapat berintegrasi dengan baik. Salah satu pihak yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi yaitu perbankan, dimana perbankan ini merupakan lembaga yang bergerak dalam sistem keuangan dalam sebuah Negara.

Lembaga keuangan perbankan adalah lembaga yang bergerak dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat dengan memberikan jasa penyaluran dana berupa kredit guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disamping itu lembaga perbankan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan/simpanan sehingga lembaga perbankan dapat menyalurkan kembali dana masyarakat tersebut kepada masyarakat berupa kredit. Menurut Martono Su (2013:2) lembaga keuangan yaitu suatu usaha yang asset utamanya berupa asset keuangan ataupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, pinjaman, obligasi ataupun aktiva riil contohnya perlengkapan, bahan baku dan bangunan.

“lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kembali kepada masyarakat”. (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok perbankan)

Secara umum lembaga keuangan merupakan setiap lembaga atau perusahaan yang aktivitas usahanya bergerak dalam bidang keuangan dimana menghimpun dana masyarakat, ataupun menyalurkan dana masyarakat (Kasmir, 2018:12). Pada lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan bank. Sektor perbankan adalah bagian terpenting dalam infrastruktur dalam kebijakan ekonomi moneter dan mikro yang berdiri kuat di tingkat nasional secara cepat kegiatan ekonomi masyarakat dituntut kepada para lembaga perbankan untuk memberikan pelayanan dan kemampuan dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat yang berperan sebagai media peranan atau pihak perantara keuangan. Dalam penghimpunan dan penyaluran harus secara optimal dan efisien dalam menjalankan usahanya, sehingga perbankan bisa dalam keadaan seimbang sehingga dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya salah satunya yaitu memenuhi likuiditasnya.

Aktivitas utama lembaga perbankan adalah memberikan pelayanan berupa pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dengan hal ini lembaga perbankan harus memberikan pengelolaan yang terbaik sehingga semakin banyak kreditor, maka akan semakin besar pula keuntungan terhadap perbankan. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pemberian kredit/pinjaman mempunyai banyak resiko yang timbul dan melekat, dimana salah satunya yaitu

dengan munculnya resiko kredit atau kredit yang bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah ini dimana debitur tidak dapat atau merasa kesulitan dalam menagih dana yang diberikan dan kreditur pun merasa kesulitan dalam membayar angsuran kepada debitur.

Dengan terjadinya kredit bermasalah akan berdampak terhadap pengurangan jumlah persediaan kas yang masuk sehingga jumlah kas yang ada di bank akan mengalami pemerosotan, dikarenakan jumlah kas yang harusnya masuk dari kredit yang disalurkan ataupun surat-surat berharga yang dimiliki bank atau lembaga perbankan seperti obligasi yang tidak dibayar seperti yang seharusnya.

Dengan kata lain kredit bermasalah dapat mengakibatkan perputaran kas semakin mengecil, jika lebih memburuk lagi maka akan mengakibatkan perputaran kas di bank menjadi terhenti dan untuk dampak positif yang ditimbulkan karena penyaluran kredit terganggu/macet tidak biasa terjadi. Karena pendapatan dari operasional dari pemberian kredit menjadi sangat kecil karena kas yang harusnya diterima oleh bank dari aktivitas timbal balik pemberian kredit tidak dapat diterima kembali oleh bank.

Menurut Riyanto (2010) perputaran kas yaitu dimana perbandingan penjualan dengan jumlah rata-rata kas. Pada perputaran kas ini untuk ukuran dari efisiensi dalam penggunaan kas dalam perusahaan karena tingkat dari perputaran kas menggambarkan kelancaran dalam berputarannya dana yang telah ditanamkan dalam bentuk modal kerja.

Pada dasarnya lembaga perbankan ataupun perusahaan lainnya baik itu swasta ataupun lembaga milik pemerintah mempunyai tujuan mendapatkan

keuntungan yang seharusnya dalam artian wajar untuk bisa melangsungkan hidup perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan kesejahteraan karyawan ataupun staf perusahaan dalam hal ini lembaga keuangan.

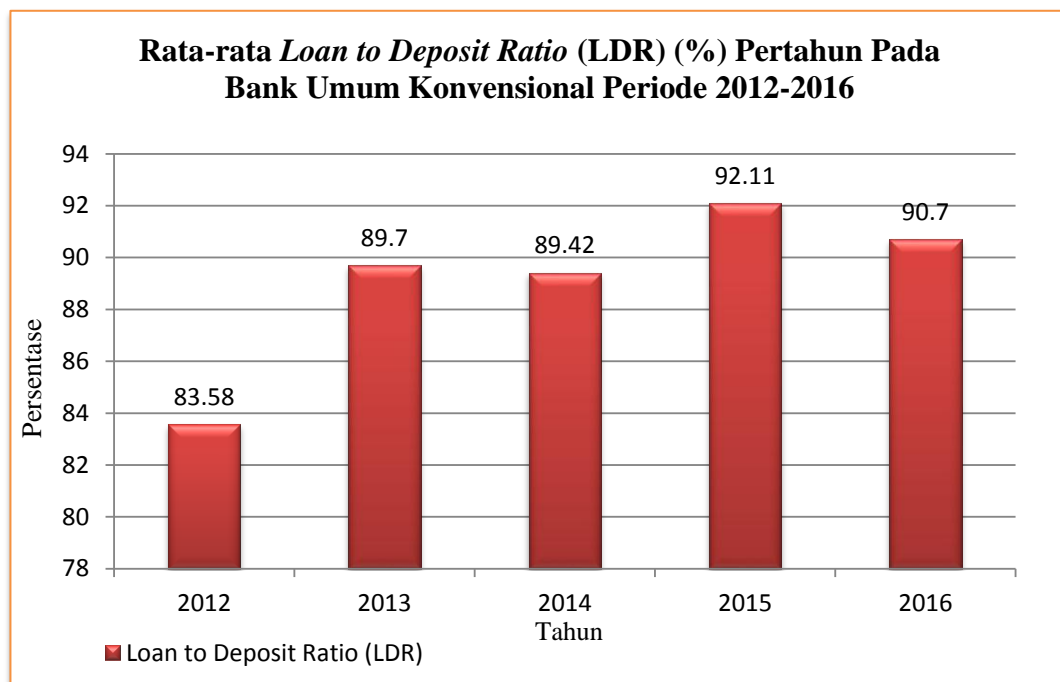
Apabila keadaan yang terjadi di bank berupa kredit bermasalah semakin tinggi maka yang akan terjadi adalah bank tidak akan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau likuiditasnya dengan baik atau seperti yang seharusnya, karena berada dalam keadaan yang tidak likuid. Seperti yang dikemukakan Ervina dkk (2018) “Bahwa likuiditas dapat dipengaruhi oleh kredit bermasalah, karena dengan munculnya kredit bermasalah, kas yang semestinya masuk dan menambah likuiditas bank tidak terjadi, sehingga mengakibatkan bank tersebut tidak mampu lagi membayar kewajiban jangka pendeknya maka bank tersebut dalam keadaan illikuid”.

Bank yang bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin dengan menjadi lembaga perantara masyarakat yang membutuhkan dana ataupun lembaga yang kelebihan dana untuk menginvestasikan dananya, menjaga kepercayaan konsumen/masyarakat dan membantu kelancaran dalam pembayaran. Lembaga perbankan apabila dalam keadaan illikuid maka akan berdampak pada kesehatan dari bank itu sendiri. Seorang investor dalam menanamkan dananya akan melihat kesehatan dari bank tersebut apakah bank itu mampu mengelola dana yang diberikan atau tidak maka penilaian kesehatan perbankan tersebut dapat menggunakan komponen rasio BOPO yang dijalankan dengan melihat keefisienan dalam operasional. Dalam laporan laba rugi ada dua elemen utama meliputi

pendapatan operasional dan biaya operasional. Jika pendapatan operasional adalah biaya yang di keluarkan dalam melaksanakan aktivitas operasi tersebut. Maka jika biaya operasionalnya besar dan hanya sedikit maka hanya sedikit pendapatan operasional yang didapatkan. Maka dari itu perbankan tersebut tergolong tidak efisien dalam melakukan aktivitas operasionalnya. Dan sebaliknya apabila biaya operasional akan mengurangi jumlah laba bersih yang dapat diperoleh karena biaya operasional adalah faktor pengurang dalam laporan laba rugi. Semakin rendah BOPO maka semakin efektif biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Sehingga kemungkinan terjadinya masalah perbankan semakin kecil dan semakin banyak kredit yang dapat dibayarkan.

BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Dimana rasio ini untuk mengukur seberapa tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi yang dijalankan. Apabila tingkat BOPO yang dihasilkan bank semakin rendah maka tingkat kinerja manajemen yang dijalankan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut berjalan secara efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam bank untuk kegiatan operasional dengan menurunkan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional maka bank pun akan mampu membayar likuiditas yang dimilikinya. Pada kegiatan perkreditan yang dilakukan oleh lembaga perbankan kebanyakan dibutuhkan oleh para pengusaha kecil atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memerlukan modal dalam menunjang berlangsungnya usaha yang dijalankan.

Menurut Undang-Undang, jenis bank hanya terbagi menjadi tiga berdasarkan fungsinya yaitu: Bank sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Namun pada Praktiknya Bank dapat dikelompokkan berdasarkan operasionalnya (Konvensional dan Syariah), Statusnya (Devisa dan Non Devisa) dan menurut kepemilikannya (Pemerintahan, Swasta dan Campuran). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Bank Umum Konvensional yaitu yang terdiri dari Bank Umum Persero (BUMN Pemerintah), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Non Devisa. Adapun tingkat rata-rata Likuiditas pada Bank Umum Konvensional selama 2012-2016 sebagai berikut:



Gambar 1. 1

Rata-rata Loan to Deposit Ratio Bank Umum Konvensional Periode 2012-2016

Sumber : www.idx.co.id (Diolah 2022)

Berdasarkan gambar 1.1 tingkat rata-rata LDR cukup berfluktuasi, dimana pada tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,12%, dari tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan sebesar 0,28%, dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,71% dan pada tahun 2016 dari tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,41%.

Dengan berfluktuasinya tingkat Likuiditas ini di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perputaran dari kas perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas tahun berjalan, tingkat pertumbuhan penjualan (kelancaran kredit yang diberikan kepada pihak ketiga), perputaran piutang dan efisiensi modal kerja. Selain itu efisiensi operasional ikut mempengaruhi fluktuasi tingkat Likuiditas. Pada penelitian ini, diambil 3 faktor yang mempengaruhi yaitu Perputaran dari kas perusahaan, Efisiensi Operasional dengan indikator (BOPO) dan kelancaran kredit yang diberikan kepada nasabah, jadi apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan atau masalah maka likuiditas perusahaan akan terganggu.

Fenomena kedua yaitu pada 15 September 2008, dunia dikejutkan oleh krisis ekonomi di AS, yaitu kejatuhan Lehman Brother. Namun pemerintah dan BI menegaskan, Indonesia dan industri perbankan aman dari dampak krisis di AS. Namun BI hanya menaikkan suku bunga acuan (*BI Rate*) 0,25% menjadi 9,5% pada 7 Oktober 2008. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan kasus Lehman Brother perekonomian nasional menjelang akhir tahun menjadi memanas. Tiba-tiba Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih PT Bank Century Tbk pada Jumat, 21 November 2008. Hal ini diakibatkan Bank Century kalah kliring

pada transaksi Kamis, 13 November 2008. Pada tanggal 20 November 2008 BI mengirimkan surat kepada kementerian keuangan untuk menetapkan bank ini sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Masalah awal yang terjadi di Bank Century ini berawal saat surat-surat berharga valas Bank Century jatuh tempo dan gagal bayar pada awal November 2008. Hal ini berdampak Bank Century mengalami kesulitan Likuiditas. Dengan posisi Rasio kecukupan modal (CAR) 3.53%. lalu bank century kalah kliring pada tanggal 13 November 2008 yang memicu aksi penarikan dana nasabah secara besar-besaran.

Setelah Bank Century diambil alih oleh LPS 23 November 2008, LPS memutuskan untuk memberikan dana talang senilai Rp.2,78 Triliun untuk dapat mencapai CAR 10%. Kemudian 5 Desember LPS menyuntikan dana kembali Rp.2,2 Triliun agar Bank Century mencapai tingkat kesehatan bank. LPS mem-*boilout* kembali hingga mencapai Rp.6,7 Triliun.

Menurut Ekonom LPS, Doddy Ariefianto. Penanganan pada tahun 2008 sudah sangat tepat, apabila tidak di *Boilout* belum tentu perekonomian Indonesia tahun tersebut bisa selamat, pasalnya krisis global 2008 sangat hebat, bank-bank besar di AS bangkrut, sehingga menjadi sentiment buruk bagi industri perbankan lain. Mengingat industri keuangan sangat rawan dengan sentiment negatif.

Direktur Eksekutif *Institute For Development Economic and Finance* (INDEF) Enny Sri Hartati salut terhadap penyelamatan Bank Century. Karena menjaga Bank Century tetap berdiri dan hidup berarti menjaga kepercayaan

nasabah terhadap bank. Hal ini mencegah terjadinya penarikan dana nasabah secara masal di seluruh perbankan.



Sumber : Bank Indonesia, BPS, IMF, Bank Dunia (www.katadata.co.id)

Gambar 1. 2

Kondisi Krisis 2008

Pada saat krisis 2008 nilai tukar rupiah merosot 18% dan harga indeks saham gabungan anjlok hingga 57%. Untuk menghadapi krisis tersebut pemerintah mengeluarkan tiga peraturan pemerintah pengganti UU, yakni Perppu Lembaga Penjamin Simpanan, Perppu Bank Indonesia, dan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan pada 13 dan 15 oktober 2008, Bank Indonesia menyalakan alarm protocol manajemen krisis.

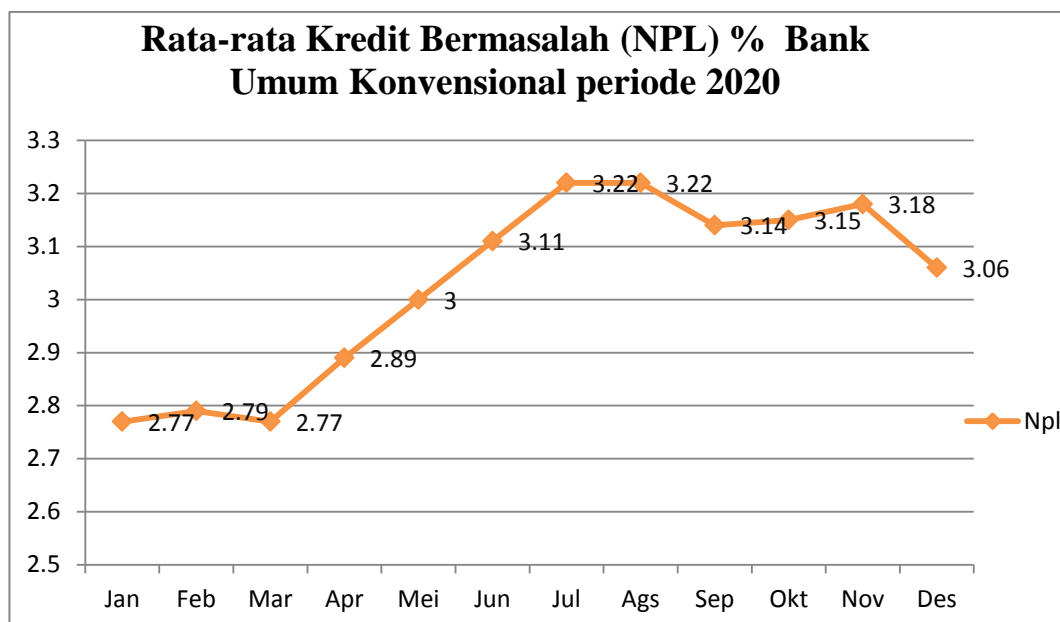
Pertumbuhan ekonomi 2008 relatif stabil dari triwulan I sampai III, namun laju inflasi terus meningkat dari 7% mencapai 11,8% pada oktober 2008. (Sumber: insight.kontan.co.id , 2019)

Fenomena ketiga, pada bulan februari 2020 di Indonesia terjadi penyebaran pandemi covid-19 yang mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan tingkat penyebaran covid-19 yang diantaranya melakukan pembatasan kegiatan dalam berbagai sektor. Penyebaran covid-19 yang sangat pesat mengakibatkan gangguan bagi kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Menanggapi hal tersebut pemerintah membuat salah satu kebijakan relaksasi kredit melalui restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh OJK melalui POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang mana peraturan ini lahir sebagai dampak penyebaran covid-19 untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran kredit untuk semua masyarakat maupun sektor usaha yang tidak sedikit pendapatannya anjlok karena kondisi pandemi tersebut. Setelah diberlakukannya POJK 11/2020 ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan memberlakukan peraturan mengenai ketetapan kebijakan tentang kualitas aset dan restrukturisasi kredit.

Adapun yang dimaksud dengan Restrukturisasi kredit menurut POJK Nomor 40/POJK.03/2019 yaitu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya. Bank adalah suatu lembaga yang berperan penting dalam

menjalankan fungsi arus dana dalam perekonomian. Kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit untuk perbankan pasti sangat berpengaruh karena kredit merupakan kegiatan usaha pokok bagi bank. Karena fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Namun ketika waktu pembayaran diperpanjang, apakah perbankan masih bisa memenuhi kewajibannya saat perputaran kas terganggu yang mempengaruhi likuiditas perbankan.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia

Gambar 1. 3

Rata-rata Kredit Bermasalah (NPL) Bank Umum Konvensional Periode 2020

Terbatasnya kegiatan ekonomi sekaligus melemahnya pendapatan masyarakat membuat transmisi penyaluran kredit terhambat dan membuat kualitas kredit semakin melemah. Dapat dilihat dari grafik pada tahun 2020 rasio kredit bermasalah (NPL) Bank Umum Konvensional Dimulai bulan Januari berada pada

2,77% , pada bulan februari mengalami kenaikan menjadi 2,79% , selanjutnya pada bulan maret mengalami penurunan sebesar 0,02% menjadi 2,77% , dari bulan maret hingga bulan juli mengalami kenaikan yang signifikan seperti terlihat pada grafik maret s/d juli berada pada posisi 2,77% - 3,22%, dari bulan agustus sampai bulan September mengalami penurunan sebesar 0,8% menjadi 3,22%, selanjutnya dari bulan september s/d November mengalami kenaikan kembali sebesar 0,4% dari 3,14% menjadi 3,18% dan pada akhir tahun mengalami penurunan kembali menjadi 3,06%. Dengan berfluktuatifnya rasio NPL ini menandakan adanya ketidak stabilan kondisi perbankan dalam kredit pada periode tahun tersebut. Dari kondisi ini mendorong peneliti apakah ada pengaruh dari fenomena tersebut dampak dari mulai banyaknya kredit yang bermasalah yang diakibatkan oleh adanya covid-19 sehingga POJK mengeluarkan peraturan restrukturisasi yaitu relaksasi kredit dimana kebijakan ini bentuk keringanan kepada kreditor dalam membayar angsuran/kredit hal ini membuat pengurangan masuknya kas kepada perusahaan Sehingga apakah berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. namun kebijakan ini pun sebagai bentuk solusi untuk menghindari kredit masalah semakin tinggi.

Dari beberapa fenomena yang telah dipaparkan mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan Judul “**Pengaruh Kredit Bermasalah, Perputaran Kas dan BOPO Terhadap Likuiditas**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Kredit Bermasalah, Perputaran Kas, BOPO dan Likuiditas Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
2. Bagaimana pengaruh secara Bersama-sama Kredit Bermasalah, Perputaran Kas dan BOPO Terhadap Likuiditas pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Kredit Bermasalah, perputaran kas dan BOPO Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui Kredit Bermasalah, Perputaran Kas dan BOPO dan Likuiditas Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bersama-sama Kredit Bermasalah, Perputaran Kas dan BOPO Terhadap Likuiditas pada Bank Umum konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kredit Bermasalah, perputaran kas dan BOPO Terhadap Likuiditas pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu baru, memperluas pemikiran penulis dengan menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. Sedangkan dalam aplikasinya diharapkan dapat memberikan sebuah pencerahan pengetahuan dan tambahan ilmu mengenai topik yang sesuai dengan judul tersebut.

2. Bagi Perusahaan Perbankan

Diharapkan bagi perusahaan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Likuiditas perusahaan, serta bagaimana pengaruh yang ditimbulkannya, sehingga informasi ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan keputusan perusahaan.

3. Bagi Pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi likuiditas bank bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan informasi terhadap pengelolaan perusahaan, keputusan untuk berinvestasi maupun bahan ajar.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diperoleh melalui *website*

www.idx.co.id yang menyediakan informasi mengenai data Laporan Keuangan Perusahaan secara sekunder. Lokasi ini dipilih karena BEI merupakan bursa pertama di Indonesia yang dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisir mengenai Laporan Keuangan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan oleh penulis terhitung mulai Oktober 2021 sampai November 2022 seperti terlampir pada lampiran 1.